



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI TIMUR

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur perlu Menyusun Rencana Strategis yang merupakan acuan penentuan program pada Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini secara garis besarnya mengupas Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budayapolitik menyesuaikan dengan perkembangan saat ini hingga ke depannya.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah sebagai unsur pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai implementasi dari RPJMD Tahun 2025-2029. Serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antara perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antar Pemerintah Propinsi, serta antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur disusun untuk menjadi arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah sebagai unsur pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 2025

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Timur,



Tejo Yuwono, S.Pd

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.197309162000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
4. Kelompok Sasaran Pelayanan	32
B. Permasalahan dan ISu Strategis	33
1. Permasalahan Perangkat Daerah	33
2. Isu Strategis Perangkat Daerah	35
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
A. Tujuan	36
B. Sasaran	38
C. Strategi dan Arah Kebijakan	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB V PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	17
Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	18
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Tahun 2021-2024	21
Tabel 2.6 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024	22
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Perangkat daerah	34
Tabel 3.1 Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan	38
Tabel 3.2 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan	38
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ...	40
Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	42
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	49
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	51
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	63
Tabel 4.3.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perlokasi dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 per Lokasi	86
Tabel 4.3.2 Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah	105
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	106
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	107
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat daerah	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
Gambar 2.2 Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025	31
Gambar 3.1 Skema Keterkaitan antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Misi Provinsi dan Nasional	37
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Cascading Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029
3. Pohon Kinerja Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya dengan menyusun Renstra. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur perlu menyusun Renstra yang memuat pernyataan visi, misi, arah kebijakan dengan pendekatan pembangunan, yang didasarkan pada kondisi politik, permasalahan kebutuhan nyata perangkat daerah, dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerah serta berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

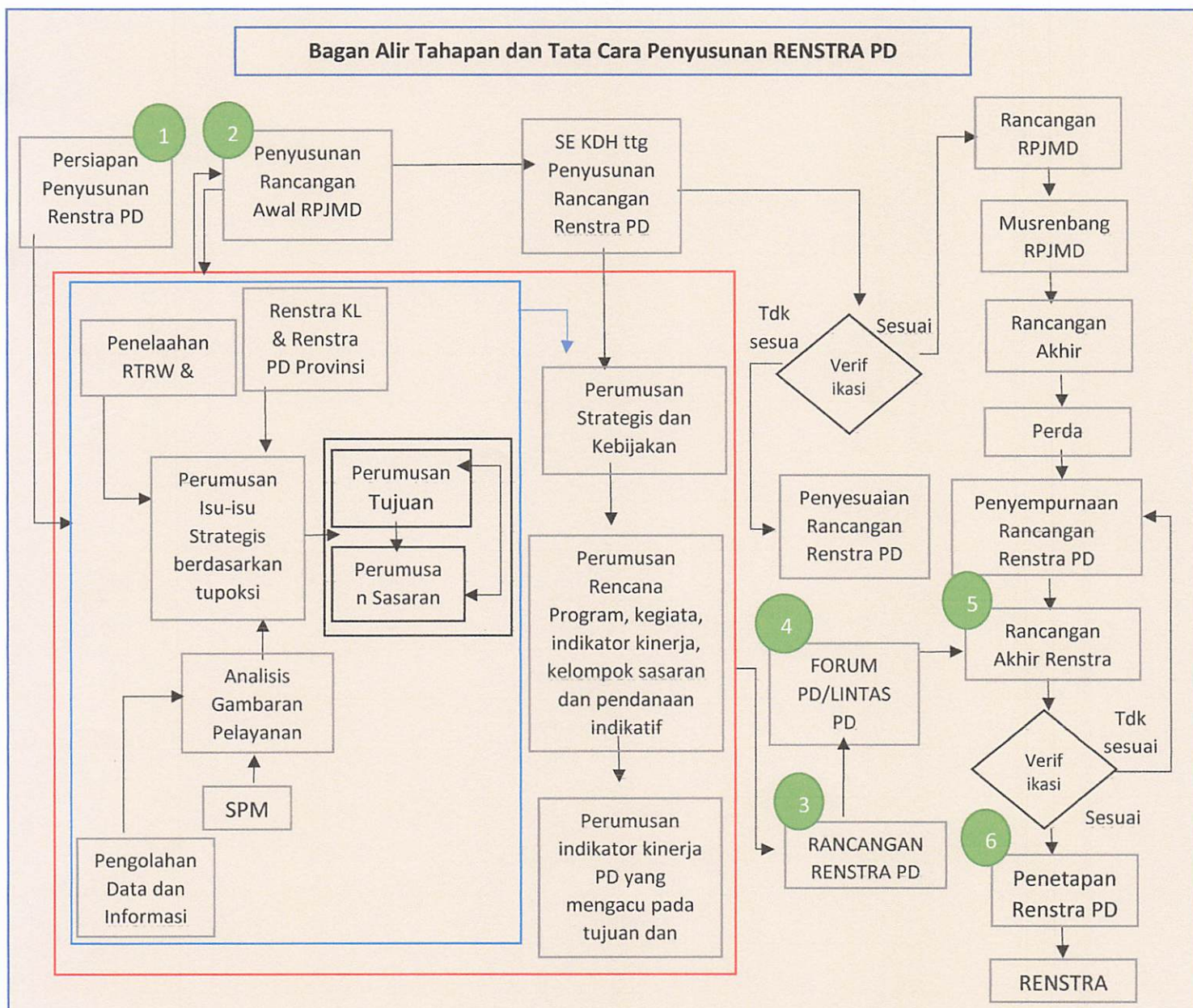
Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya khususnya dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 disusun melalui 5 tahapan :

- 1.) Penyusunan Rencana ;
- 2.) Penetapan Rencana;
- 3.) Sosialisai Rencana;
- 4.) Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana;
- 5.) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Kelima tahapan penyusunan Renstra dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga membentuk sebuah siklus perencanaan yang utuh.

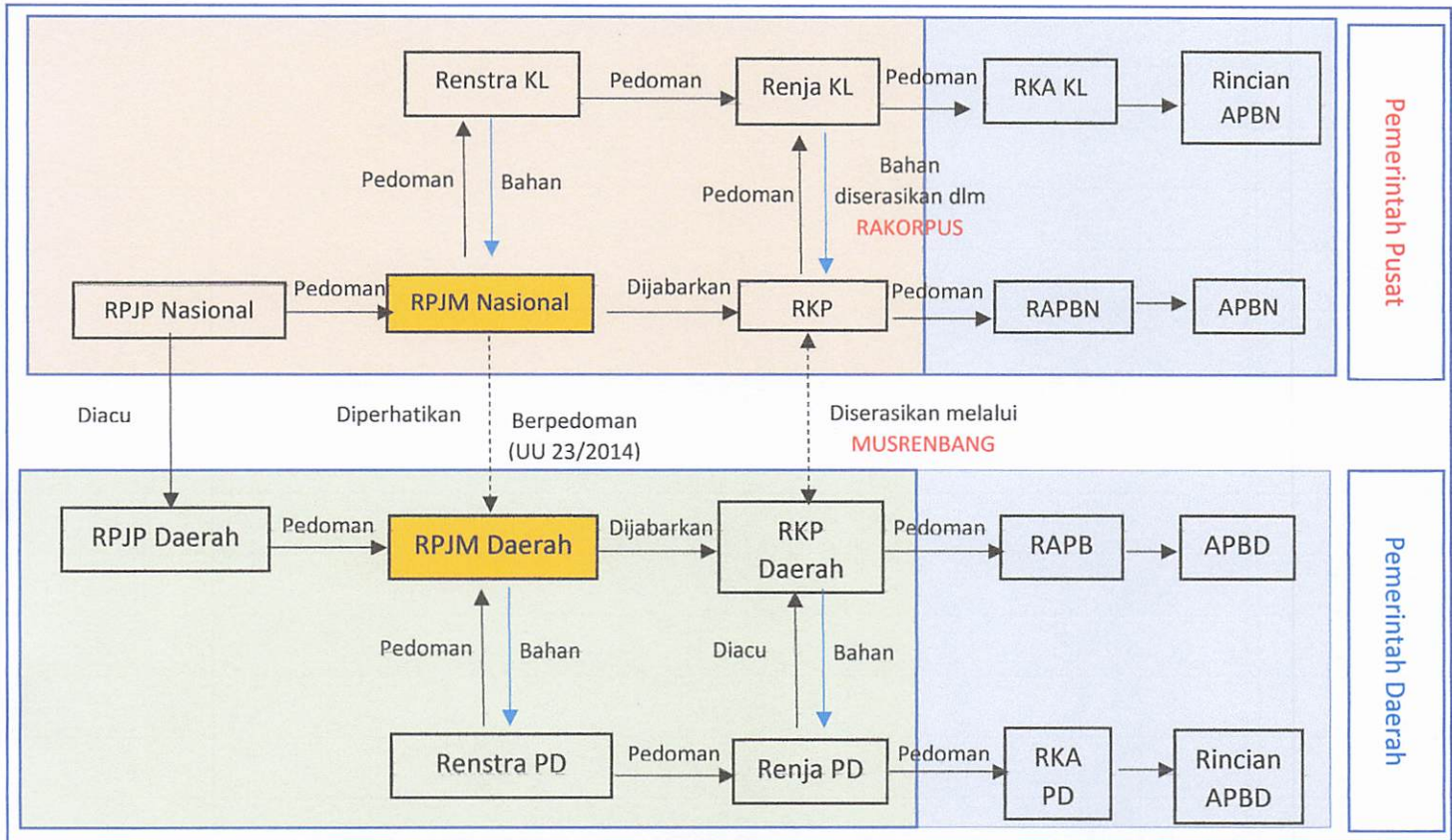
Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, juga sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yakni pedoman pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Keterkaitan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian / Lembaga Negara dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai mana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

B. Dasar Hukum

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 – 2045.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
24. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan umum.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah maupun dengan kebutuhan pihak terkait lainnya.

2. Tujuan

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

- b. Memperkuat pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN memuat tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD dan sistematika penulisan Renstra PD.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH memuat gambaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, susunan kepegawaian dan sarana prasarana, kondisi umum yang menjadi kewenangan PD, dan jenis pelayanan dan kelompok sasaran yang diampu. Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026, Capaian program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 2021-2026, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Tahun 2025-2029.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaah Visi, Misi dan Program RPJMD, telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yang merupakan penjabaran dari misi.

BAB V : STRATEGIS DAN KEBIJAKAN berisi tentang strategis cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi tentang indikator kinerja dan targetnya pertahun selama 5 (lima) tahun (2025-2029) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi tanggungjawab PD.

BAB VIII : PENUTUP berisi tentang intisari dari seluruh materi yang diuraikan yang merupakan penegasan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur terhadap pelaksanaan Renstra PD.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dengan adanya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

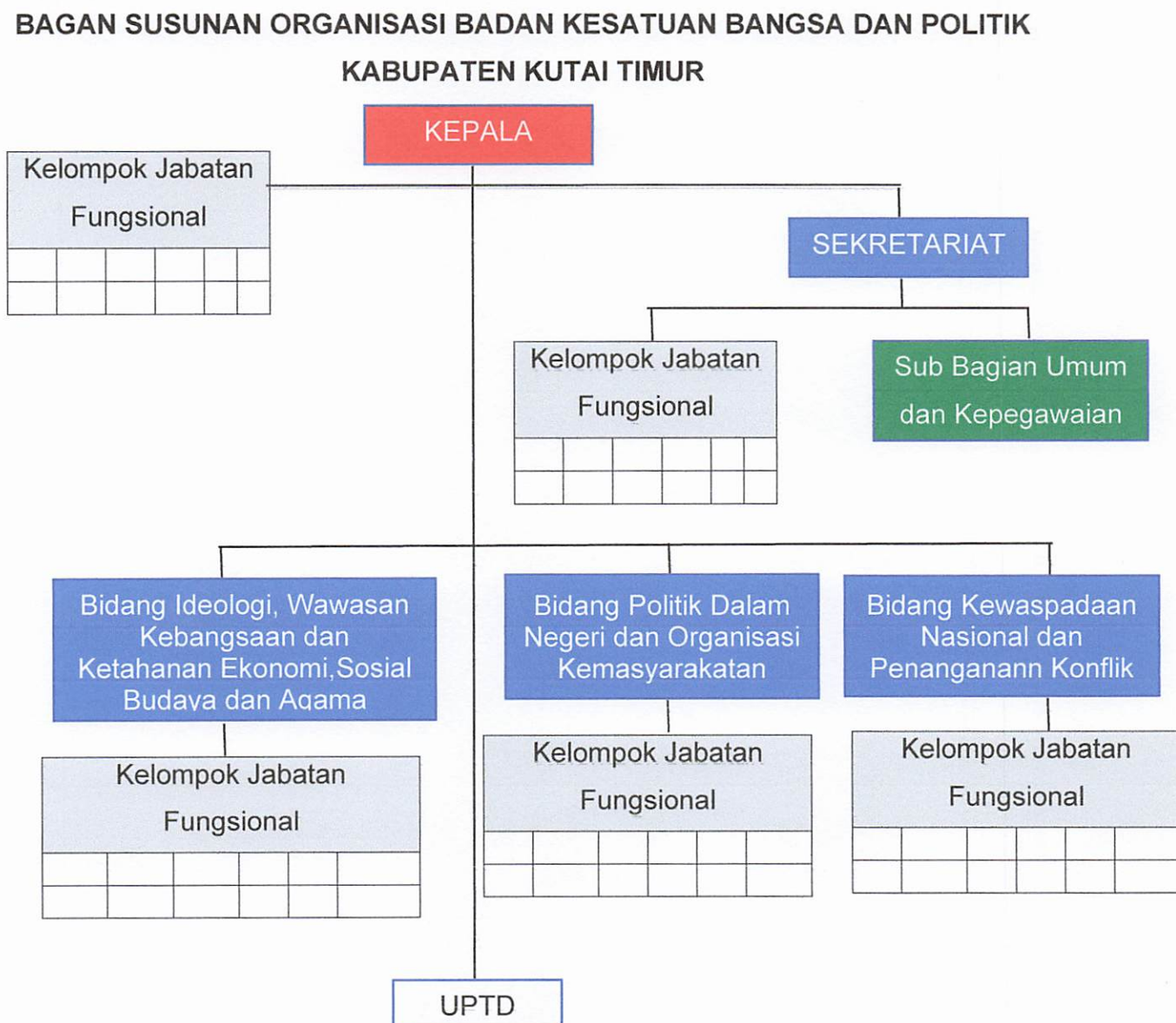
Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur yakni membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- d. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik; Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Agar lebih jelas dalam menggambarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur berikut bagan struktur organisasi di maksud.



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan, pembinaan pelayanan publik, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- 4) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, pelaksanaan administrasi Badan dan pembinaan kepegawaian;
- 5) Pengelolaan anggaran Badan;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 7) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- 8) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 9) Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 10) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- 11) Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- 12) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyeleenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- l. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan;
- m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- n. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- o. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Pelayanan;
- p. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian serta pengembangan teknis bidang Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengendalian koordinasi, pembinaan dan bimbingan, teknis Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Z pemilihan umum Kepala Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umumrrr/pemilihan umum Kepala Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan mediasi ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum Kepala Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran onnas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum Kepala Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi ormas, pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah kabupaten;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum Kepala Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi ormas, pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing.. tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan diri, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga

- asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi lain.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur didukung oleh sumber daya aparatur dan Sarana Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur sejumlah 66 (enam puluh enam) orang yang terdiri dari :

1. Jabatan Struktural eselon II b sebanyak : 1 Orang
2. Jabatan Struktural eselon IIIb sebanyak : 4 Orang
3. Jabatan Struktural eselon IVa sebanyak : 1 Orang
4. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak : 5 Orang
5. Jabatan Fungsional sebanyak : 4 Orang
6. Jabatan Fungsional Umum sebanyak : 51 Orang

Secara kuantitatif kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur masih belum mencukupi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Namun jumlah pegawai yang ada sekarang, tetap dapat dianggap sebagai potensi yang akan mampu mendukung pelaksanaan ketugasan dengan baik. Potensi SDM ini dapat dimanfaatkan apabila manajemen pengelolaan SDM dapat

dioptimalkan terutama yang berkaitan dengan masalah pembinaan dan penilaian kinerja aparatur, serta penerapan reward and punishment yang ketat, akurat, adil dan seimbang. Profesionalisme juga akan tercapai apabila setiap aparat mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing terhadap kinerja unit kerjanya serta adanya peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis maupun diklat teknis. Untuk mengetahui keadaan personil perlu juga diketahui komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat usia dan lainnya. Komposisi yang disajikan dalam tabel-tabel ini dimaksudkan agar pengelolaan SDM dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berlangsung optimal. Berikut tabel komposisi pegawai yang terdiri dari Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan dan Pendidikan.

Tabel 2.1 Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	29 Orang
2	Perempuan	37 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2025

Tabel 2.2 Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	-	-	-
2	II	1	3	4
3	III	7	13	20
4	IV	6	4	10
5	V PPPK	4	4	8
6	VII PPPK	-	1	1
7	IX PPPK	11	12	23

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2025

Tabel 2.3 Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	SMA	7	7	14
2	D3	-	2	2
3	S1	16	23	39
4	S2	5	6	11

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2025

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur perlu adanya sarana dan prasarana yang harus dimiliki. Sarana dan prasarana tersebut antara lain lahan/tanah, peralatan dan mesin penunjang, bangunan/gedung serta lain-lain yang menunjang operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur. Adapun data sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kutai Timur**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Sedang	Rusak
I	ASSET					
	1. Tanah	M2	5320	√		
	2. Bangunan/Gedung	M2	1232	√		
II	KENDARAAN					
	1. Roda 4	Unit	8	√		
	2. Roda 2	Unit	25	√		
III	PERALATAN DAN MESIN					
1	Lemari Kayu	Buah	21	√		
2	Lemari Kaca	Buah	10	√		
3	Lemari Besi	Buah	10	√		
4	Lemari Piring	Buah	2	√		
5	Filling Kabinet Besi	Buah	12	√		
6	Brankas	Buah	1	√		
7	Kursi Rapat	Buah	20	√		
8	Kursi Putar	Buah	21	√		
9	Kursi Lipat	Buah	83	√		
10	Kursi Tamu	Buah	6	√		
11	Meja Kerja	Buah	24	√		
12	Meja Rapat	Buah	2	√		
13	Meja Komputer	Buah	22	√		
14	Sofa	Buah	14	√		

15	Komputer	Buah	31	√		
16	Laptop	Buah	21	√		
17	Scaner	Buah	11	√		
18	Printer	Buah	38	√		
19	Mesin Penghancur Kertas	Buah	5	√		
20	Infocus Projector	Buah	2	√		
21	Mesin Ketik	Buah	5	√		
22	Hardisk	Buah	2	√		
23	Televisi	Buah	3	√		
24	Sound System	Buah	2	√		
25	Wireles	Buah	2	√		
26	AC	Buah	36	√		
27	Kipas Angin	Buah	3	√		
28	Jam Dinding	Buah	6	√		
29	Kulkas	Buah	8	√		
30	Dispenser	Buah	8	√		
31	Papan Tulis/Papan Pengumuman	Buah	1	√		
32	Bagan Struktur	Buah	1	√		
33	Mesin Potong Rumput	Buah	1	√		

Sumber : Bagian Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2025

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur meliputi urusan pemerintahan umum yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama melalui fasilitasi pembinaan FKUB, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
2. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui fasilitasi Kegiatan penguatan ideologi di masyarakat dalam bentuk sosialisasi wawasan kebangsaan;

3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik melalui koordinasi di Forkompinda, koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Tim Penanganan Konflik dan pelibatan anggota masyarakat melalui FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat).
4. Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

TABEL 2.5 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	12
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK, dan PPKW)	%	18,75	18,75	76	75,83	18,75	16	76	100	100	85,33	100	131,874
3	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	%	11	22	43	65	11	11,11	43	72	113,008	50,5	100	110,769
4	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	LSM	123	139	169	199	139	228	106	255	100	164,03	62,72	128,14
5	Cakupan Forum dan UKM yang mendapatkan pendidikan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (FKUB,P4GN)	%	20	20	40	60	20	26,32	40	60,28	100	131,6	100	100,467
6	Jumlah Konflik Sara	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100
7	Cakupan penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TABEL 2.6 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100,00	100,00	14.598.816.714,00	13.082.283.256,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5,00	5,00	750.000.000,00	739.817.972,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	350.000.000,00	344.132.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100.000.000,00	98.713.200,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	50.000.000,00	49.366.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	100.000.000,00	97.832.300,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	4,00	150.000.000,00	149.774.472,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	9.976.816.714,00	8.593.451.586,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39,00	39,00	7.963.479.321,00	6.624.883.138,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	23,00	23,00	1.063.337.393,00	1.028.447.548,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	4,00	700.000.000,00	690.720.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,00	2,00	250.000.000,00	249.400.500,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	150.000.000,00	143.964.800,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	2,00	50.000.000,00	45.570.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	4,00	100.000.000,00	98.394.800,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	590.330.000,00	585.634.094,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	5,00	150.000.000,00	149.595.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	20,00	440.330.000,00	436.039.094,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	4,00	1.468.849.040,00	1.454.956.050,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	278.000.000,00	270.222.700,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	150.000.000,00	149.327.300,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	740.000.000,00	739.554.100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	300.849.040,00	295.851.950,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	24,00	24,00	550.000.000,00	458.037.595,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	300.000.000,00	208.717.895,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	250.000.000,00	249.319.700,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	82,00	82,00	1.112.820.960,00	1.106.421.159,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25,00	25,00	200.000.000,00	195.861.950,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56,00	56,00	200.000.000,00	199.752.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	712.820.960,00	710.806.709,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK dan PPWK)	%	75,83	75,83	10.050.000.000,00	9.931.881.945,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	1,00	1,00	10.050.000.000,00	9.931.881.945,00
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	150.000.000,00	137.643.500,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	1.150.000.000,00	1.147.387.600,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.100,00	1.150,00	300.000.000,00	299.884.400,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.125,00	1.150,00	1.000.000.000,00	979.207.796,00
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	225,00	18,00	150.000.000,00	147.683.949,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	200,00	200,00	150.000.000,00	148.190.800,00
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	1,00	1,00	800.000.000,00	791.394.000,00
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	200,00	200,00	5.650.000.000,00	5.589.157.400,00
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1,00	1,00	500.000.000,00	493.873.500,00
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	40,00	40,00	200.000.000,00	197.459.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	%	65,00	65,00	59.712.875.000,00	56.881.288.993,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	15,00	15,00	59.712.875.000,00	56.881.288.993,00
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	150.000.000,00	144.442.070,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	13,00	13,00	46.321.565.833,00	46.272.405.517,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5.200,00	5.000,00	2.893.309.167,00	2.727.720.800,00

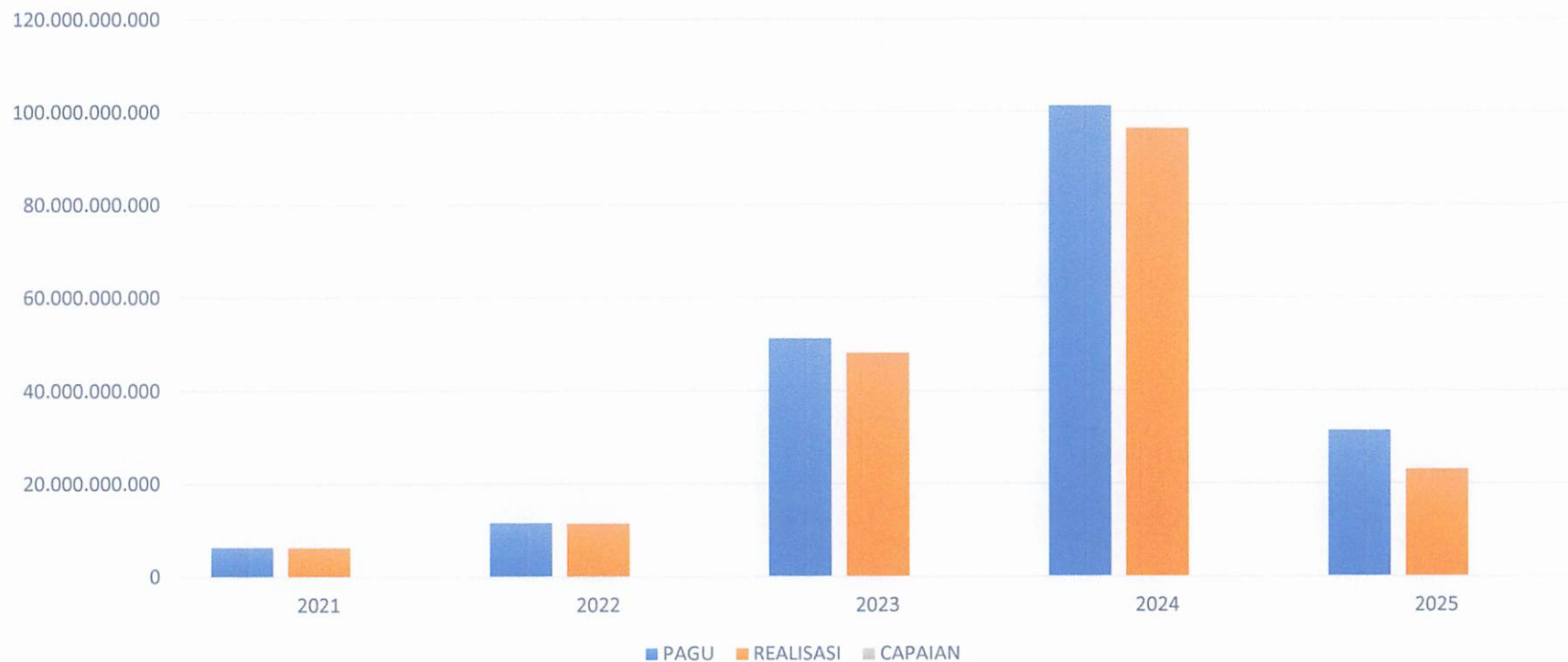
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2.800,00	2.800,00	1.500.000.000,00	1.284.420.342,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	2,00	2,00	8.848.000.000,00	6.452.300.264,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah LSM/Organisasi yang Aktif	LSM	199,00	255,00	8.327.000.000,00	8.028.507.979,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1,00	1,00	8.327.000.000,00	8.028.507.979,00
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	100.000.000,00	51.002.000,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	226,00	164,00	5.975.000.000,00	5.770.960.800,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	350,00	350,00	1.852.000.000,00	1.841.754.780,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50,00	50,00	200.000.000,00	181.505.580,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	18,00	18,00	200.000.000,00	183.284.819,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Forum dan UKM yang mendapat Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (FKUB, P4GN)	%	60,00	60,00	2.250.000.000,00	2.243.522.185,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1,00	1,00	2.250.000.000,00	2.243.522.185,00
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	150.000.000,00	149.173.500,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	1.150.000.000,00	1.147.966.807,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.000,00	1.000,00	500.000.000,00	497.914.314,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50,00	50,00	300.000.000,00	298.607.904,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	18,00	18,00	150.000.000,00	149.859.660,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik SARA	Kasus	0,00	0,00	6.350.000.000,00	6.258.636.930,00
	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur	%	100,00	100,00	6.350.000.000,00	6.258.636.930,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	3,00	3,00	6.350.000.000,00	6.258.636.930,00
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4,00	4,00	150.000.000,00	149.685.000,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1,00	1,00	1.700.000.000,00	1.646.423.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	500,00	500,00	500.000.000,00	499.684.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	50,00	50,00	500.000.000,00	499.703.089,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4,00	4,00	500.000.000,00	498.595.400,00
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	4,00	3.000.000.000,00	2.964.546.441,00

GRAFIK REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
PAGU	6.328.201.002	11.631.026.294	51.242.461.271	101.288.691.714	31.382.474.291
REALISASI	6.272.011.038	11.501.939.216	48.139.855.065	96.426.121.288	23.042.109.037
CAPAIAN	99	99	94	95	73

4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur melaksanakan berbagai layanan kepada kelompok sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :

1. Masyarakat umum.

Layanan yang diberikan kepada masyarakat umum difokuskan pada pembinaan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan semangat bela negara melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan kebangsaan, dan pembinaan karakter bangsa.

2. Partai Politik.

Layanan yang diberikan kepada partai politik berupa fasilitasi pendidikan politik, pembinaan kelembagaan partai, serta penyaluran dan pengawasan bantuan keuangan partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Organisasi Kemasyarakatan,

Layanan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan meliputi registrasi, penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), pembinaan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan agar sejalan dengan peraturan dan nilai-nilai kebangsaan.

4. Forum-forum.

Forum forum kebangsaan seperti FKUB, FPK, dan FKDM difasilitasi melalui dukungan koordinatif, pembinaan kapasitas, serta pendampingan kegiatan dalam rangka memperkuat komunikasi antar elemen masyarakat dan menjaga kerukunan sosial di daerah.

5. Pelajar dan Mahasiswa

Layanan kepada pelajar dan mahasiswa diarahkan pada pembinaan karakter kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi.

6. Pemerintah daerah dan Instansi Vertikal.

Badan Kesbangpol juga memberikan layanan koordinasi dan integrasi informasi kepada pemerintah daerah serta instansi vertikal dalam rangka

peningkatan kewaspadaan nasional, pencegahan konflik sosial, dan penguatan ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

7. Pemilih dan masyarakat pemantau politik.

Di bidang politik dalam negeri, layanan diberikan kepada pemilih dan masyarakat pemantau politik melalui pendidikan politik, sosialisasi demokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan kehidupan berdemokrasi.

8. Kelompok rentan sosial dan masyarakat di wilayah rawan konflik,
Pada kelompok ini, Badan Kesbangpol memberikan layanan deteksi dini, fasilitasi mediasi, serta pembinaan daerah rawan sosial politik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat.

Secara keseluruhan, semua layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk mendukung terciptanya stabilitas daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, demokratis, dan berwawasan kebangsaan.

B. Permasalahan dan ISu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan perangkat daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja perangkat daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Setelah ditelaah hasil analisis permasalahan perangkat daerah pada masing-masing bidang sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) perangkat daerah, diperoleh rumusan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih adanya konflik dan gejolak di masyarakat	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
			2. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
			3. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan
			4. Belum optimalnya sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat di wilayah kabupaten Kutai Timur
			5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yg berlaku
2	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Bakesbangpol	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1 Pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum belum memadai.
			2 Masih lemahnya pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD.
			3 Kurangnya kompetensi SDM Aparatur
			4 Masih lemahnya pengelolaan dan penataan kearsipan
			5 Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi perangkat daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah perangkat daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi perangkat daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Integritas Partai Politik
- Peningkatan Kualitas Demokrasi
- Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional
- Penanganan konflik sosial
- Stabilitas Ekonomi, Kerukunan Sosial dan Penguatan Seni budaya Indonesia dalam mendukung Ketahanan Nasional
- Fasilitasi dan sinergitas Penanganan Penyakit Masyarakat (Narkoba, Judi Online, Pornografi, dan Prostitusi).
- Peningkatan peran Ormas melalui penguatan kelembagaan, pengawasan, dan pemberdayaan
- Penguatan peran pemerintah dalam pengawasan, pemberdayaan ormas serta digitalisasi pendaftaran dan pemanfaatan data ormas
- Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Daerah
- Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Forkopimda
- Penguatan FKUB, FPK, FKDM, dan PPWK dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.

BAB III

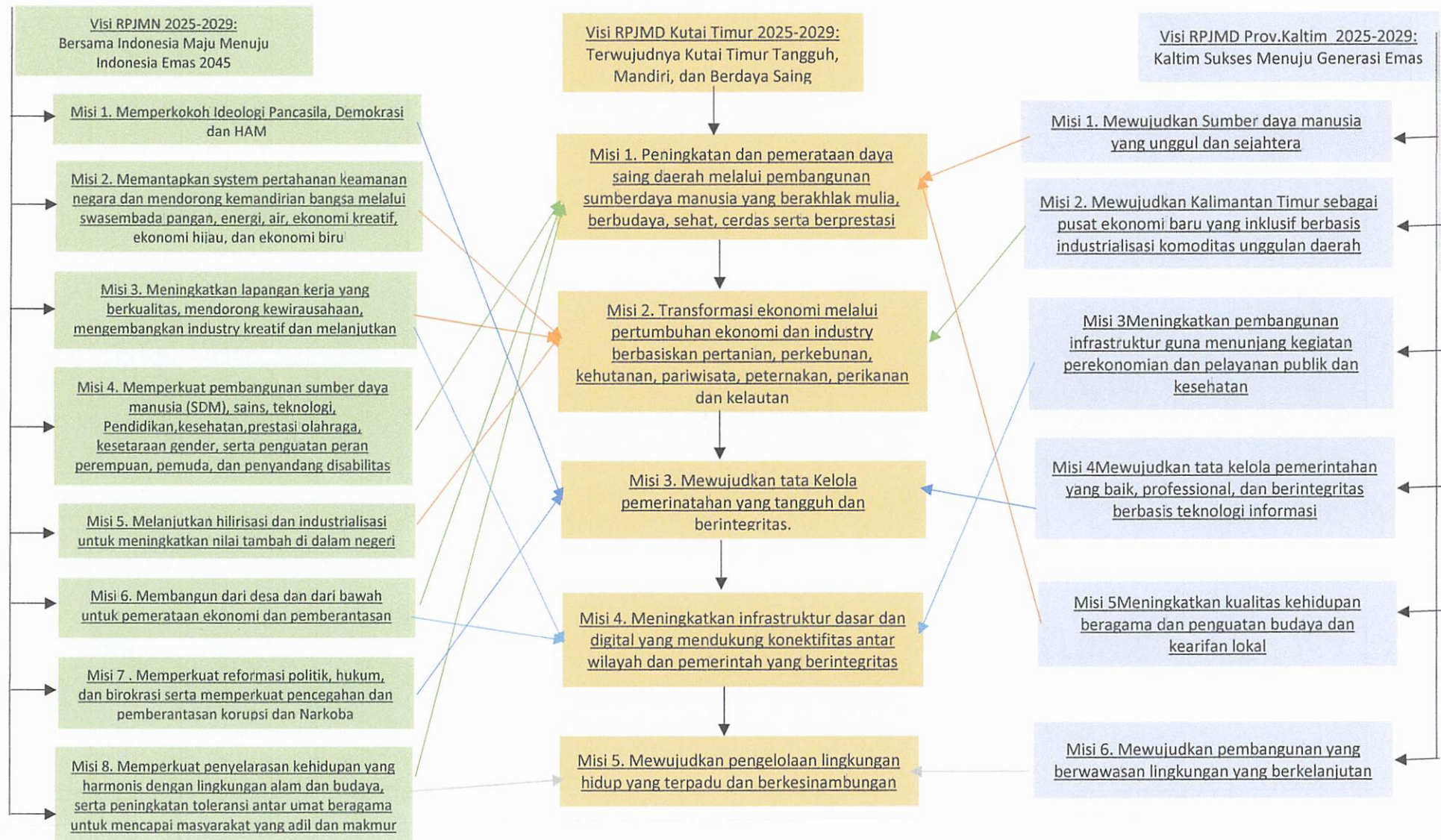
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur memerlukan perumusan komponen perencanaan yang terstruktur, yaitu tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Keempat elemen ini merupakan bagian integral dari kerangka logis perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah strategis yang sesuai dengan mandat kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat ketahanan ideologi, menjaga stabilitas politik, serta membangun partisipasi masyarakat yang inklusif. Tujuan ini dijabarkan secara lebih konkret dan terukur melalui sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran capaian. Untuk mencapai sasaran tersebut, disusun strategi sebagai pendekatan utama yang mencerminkan langkah-langkah prioritas dan orientasi kebijakan organisasi. Strategi kemudian diturunkan ke dalam arah kebijakan, yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Secara keseluruhan, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur berperan penting sebagai instrumen manajemen strategis guna memastikan bahwa seluruh proses pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berjalan secara terarah, konsisten, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

A. Tujuan

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Gamba 3.1 Skema Keterkaitan Antara Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Misi Provinsi dan Nasional



Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu **Tujuan 3: “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif.”**

Tabel 3.1 Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan

Tujuan	
Uraian	Indikator
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif.	Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : RPJMD Kutai Timur Tahun 2025-2029

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur mengacu pada **Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”**.

Tabel 3.2 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan

Sasaran	
Uraian	Indikator
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik

Sumber : RPJMD Kutai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 3.3. berikut:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
- Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,48	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
		Meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.	Indeks Kerawanan Sosial (Indeks)	43,77	41,77	39,87	38,05	36,31	34,64	32,31	

C. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah berisikan program - program sebagai prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kutai Timur, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kutai Timur yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur disajikan pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.	Penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat	Meningkatkan akses informasi public dan memperkuat pelayanan informasi untuk masyarakat dengan menyediakan portal informasi pemerintah yang mudah diakses dan transparan.
		Peningkatan Kompetensi dan Etika Pelaksana Layanan melalui pelatihan pelayanan prima.	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
		Melakukan pendeteksian dan pencegahan dini segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkuat ideologi pancasila,
		Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat.	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kualitas demokrasi, pembinaan kerukunan SARA, penguatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya serta pembinaan Organisasi kemasyarakatan.
		Meningkatkan sinergitas antar instansi dalam penanganan konflik sosial di Kutai Timur	Fasilitasi penyelesaian konflik sosial secara preventif dan partisipatif

Sumber : Badan Kesbangpol 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Bab ini akan membahas seluruh rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai kinerja pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 - ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Aset
2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan :
- ❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

- Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- Pembentukan Paskibraka
- Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
- Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

3. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan kegiatan :

❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik., dengan sub kegiatan :

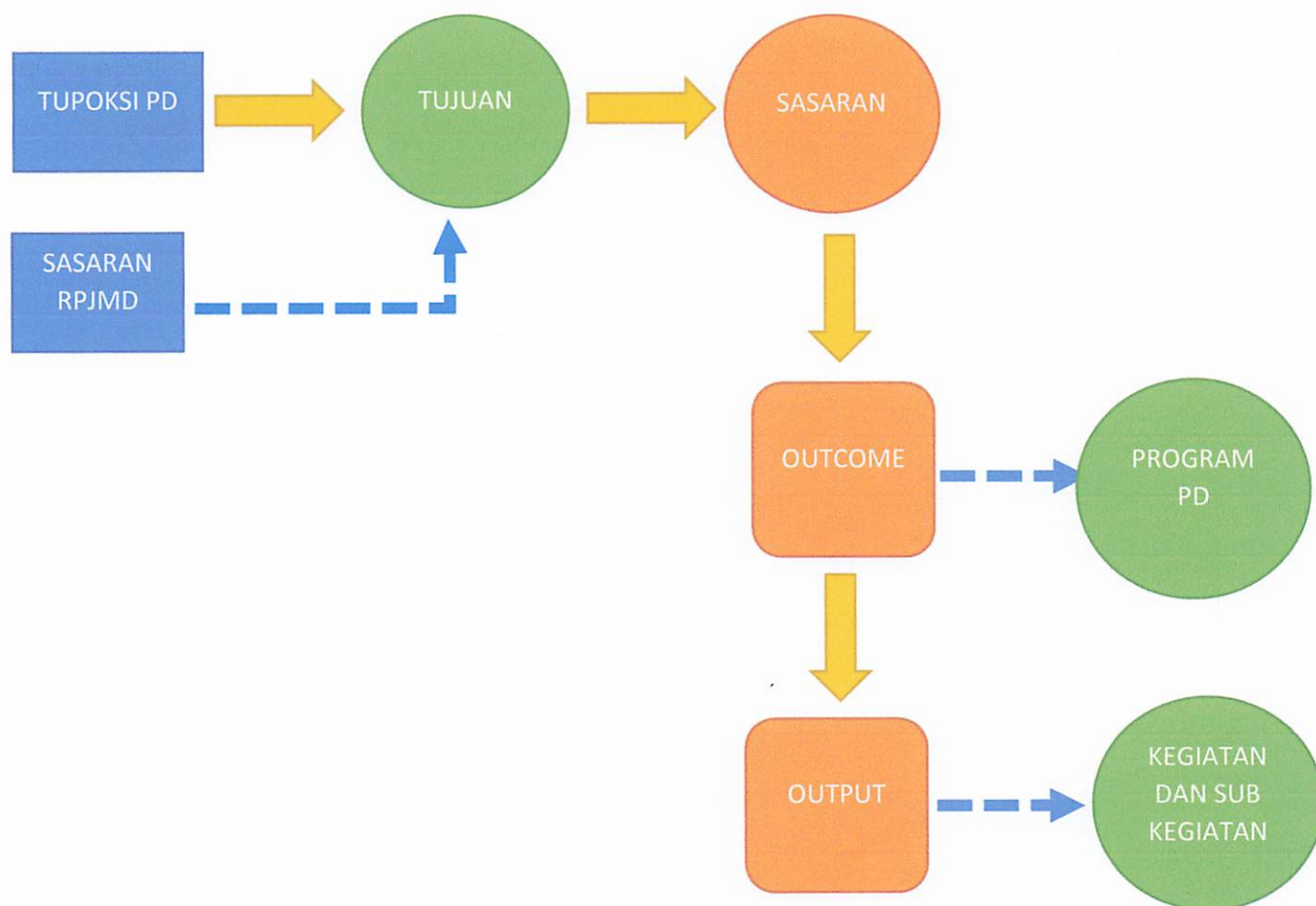
- Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :

- ❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
 - ❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Program Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :
- ❖ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					18.534.452.715		19.308.613.156		20.121.481.619		20.974.993.507		21.871.180.987	
8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					2.352.275.397		2.450.526.939		2.553.691.058		2.662.013.384		2.775.751.825	
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	-	63,4	66,72	2.352.275.397	70,04	2.450.526.939	73,36	2.553.691.058	76,68	2.662.013.384	80	2.775.751.825	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79	80	80		82		82		84		84		
8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					5.483.711.777		5.712.759.421		5.953.259.447		6.205.784.475		6.470.935.754	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	100	20,53	40,40	5.483.711.777	60,26	5.712.759.421	80,13	5.953.259.447	100	6.205.784.475	100	6.470.935.754	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					2.272.767.995		2.367.698.614		2.467.375.764		2.572.036.772		2.681.930.830	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	72	11,20	28	2.272.767.995	33,50	2.367.698.614	39	2.467.375.764	100	2.572.036.772	100	2.681.930.830	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					798.125.178		831.461.848		866.465.352		903.219.031		941.810.394	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	128	28	30	798.125.178	50	831.461.848	70	866.465.352	100	903.219.031	100	941.810.394	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					1.818.076.894		1.894.015.646		1.973.751.336		2.057.473.810		2.145.382.408	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	60,28	2,45	27,00	1.818.076.894	52,78	1.894.015.646	79,78	1.973.751.336	100	2.057.473.810	100	2.145.382.408	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					5.809.495.474		6.052.150.688		6.306.938.662		6.574.466.035		6.855.369.776	
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0	0	0	5.809.495.474	0	6.052.150.688	0	6.306.938.662	0	6.574.466.035	0	6.855.369.776	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase penanganan konflik sosial (%)	100	100	100		100		100		100				
TOTAL KESELURUHAN					18.534.452.715		19.308.613.156		20.121.481.619		20.974.993.507		21.871.180.987	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.	Terlaksananya penunjang perangkat daerah		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
					Indeks Kerawanan Sosial (Indeks)		
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
					Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		8.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
					Tersedianya Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik		Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat		Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
				Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
					Persentase penanganan konflik sosial (%)	8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				18.534.452.715		19.308.613.156		20.121.481.619		20.974.993.507		21.871.180.987		
8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				2.352.275.397		2.450.526.939		2.553.691.058		2.662.013.384		2.775.751.825		
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	-	66,72	2.352.275.397	70,04	2.450.526.939	73,36	2.553.691.058	76,68	2.662.013.384	80	2.775.751.825	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79	80		82		82		84		84			
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000		150.000.000		150.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	75.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	250.000.000	7	250.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	50.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	150.000.000	7	150.000.000		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.150.083.968		1.275.526.939		1.278.691.058		1.287.013.384		1.400.751.825		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	1.150.083.968	2	1.275.526.939	2	1.278.691.058	2	1.287.013.384	2	1.400.751.825		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	66		66		66		66					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4					
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.051.083.968		1.075.526.939		1.078.691.058		1.087.013.384		1.200.751.825		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	66	1.051.083.968	66	1.075.526.939	66	1.078.691.058	66	1.087.013.384	66	1.200.751.825		
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				71.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	4	71.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				28.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	28.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	66		66		70		70		70			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		66	175.000.000	30	100.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000		
8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				75.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	66	75.000.000	66	50.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		66	100.000.000	30	50.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	35	370.000.000	40	350.000.000	43	350.000.000	45	350.000.000	38	350.000.000		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		3		4		3			
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	150.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	3	100.000.000		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	35	120.000.000	40	150.000.000	43	150.000.000	45	150.000.000	38	150.000.000		
8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.970.229		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	135.970.229	15	100.000.000	10	100.000.000	5	100.000.000	20	100.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.064.853		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	83.064.853	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.905.376		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	52.905.376	15	50.000.000	10	50.000.000	5	50.000.000	20	50.000.000		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				276.960.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	276.960.000	12	290.000.000	12	290.000.000	12	290.000.000	12	290.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.960.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	156.960.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.261.200		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	29	159.261.200	29	175.000.000	29	175.000.000	20	175.000.000	20	175.000.000		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	38		37		1		1		1			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	29	100.000.000	29	100.000.000	29	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
8.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				59.261.200		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	38	59.261.200	37	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				5.483.711.777		5.712.759.421		5.953.259.447		6.205.784.475		6.470.935.754		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	100	40,40	5.483.711.777	60,26	5.712.759.421	80,13	5.953.259.447	100	6.205.784.475	100	6.470.935.754	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				5.483.711.777		5.712.759.421		5.953.259.447		6.205.784.475		6.470.935.754		
Tersedianya Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	18	3	5.483.711.777	5	5.712.759.421	5	5.953.259.447	5	6.205.784.475	5	6.470.935.754		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	2		2		2		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	200	750		750		750		750		750			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.125	30		30		30		30		30			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.100	500		550		600		650		650			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	200	350		400		450		500		500			
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	40	40		40		40		40		40			
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	2		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10.000.000		12.759.421		100.000.000		55.784.475		120.935.754	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	2	10.000.000	2	12.759.421	2	100.000.000	3	55.784.475	3	120.935.754		
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100.000.000		100.000.000		150.000.000		100.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.100	500	250.000.000	550	200.000.000	600	250.000.000	650	250.000.000	650	250.000.000		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250.000.000		300.000.000		303.259.447		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.125	30	250.000.000	30	300.000.000	30	303.259.447	30	250.000.000	30	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200.000.000		250.000.000		250.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	18	3	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000		
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				150.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	200	750	150.000.000	750	250.000.000	750	200.000.000	750	200.000.000	750	150.000.000		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				3.873.711.777		4.000.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	200	350	3.873.711.777	400	4.000.000.000	450	4.000.000.000	500	4.500.000.000	500	4.500.000.000		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				150.000.000		100.000.000		200.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	40	40	150.000.000	40	100.000.000	40	200.000.000	40	150.000.000	40	200.000.000		
8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				2.272.767.995		2.367.698.614		2.467.375.764		2.572.036.772		2.681.930.830		
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	72	28	2.272.767.995	33,50	2.367.698.614	39	2.467.375.764	100	2.572.036.772	100	2.681.930.830	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				2.272.767.995		2.367.698.614		2.467.375.764		2.572.036.772		2.681.930.830		
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	1	2.272.767.995	1	2.367.698.614	1	2.467.375.764	2	2.572.036.772	2	2.681.930.830		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.200	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.800	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50.000.000	50.000.000	100.000.000	200.000.000	281.930.830						
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	281.930.830		
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.472.767.995	1.617.698.614	1.500.000.000	1.300.000.000	1.000.000.000						
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	11	11	1.472.767.995	11	1.617.698.614	11	1.500.000.000	11	1.300.000.000	11	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100.000.000	300.000.000			250.000.000		400.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.200	100	100.000.000	100	300.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300.000.000	200.000.000			267.375.764		372.036.772		300.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.800	100	300.000.000	100	200.000.000	100	267.375.764	100	372.036.772	100	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				350.000.000		200.000.000		350.000.000		300.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	1	350.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	2	300.000.000	2	600.000.000		
8.01.04 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				798.125.178		831.461.848		866.465.352		903.219.031		941.810.394		
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	128	30	798.125.178	50	831.461.848	70	866.465.352	100	903.219.031	100	941.810.394	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				798.125.178		831.461.848		866.465.352		903.219.031		941.810.394		
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	798.125.178	1	831.461.848	1	866.465.352	1	903.219.031	1	941.810.394		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	350	300				400				400			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				84.735.155		100.000.000		116.465.352		100.000.000		91.810.394		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	84.735.155	1	100.000.000	1	116.465.352	1	100.000.000	1	91.810.394		
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100.000.000		150.000.000		200.000.000		103.219.031		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	103.219.031	1	150.000.000		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				413.390.023		331.461.848		300.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	350	300	413.390.023	400	331.461.848	400	300.000.000	500	400.000.000	500	400.000.000		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	100.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				1.818.076.894		1.894.015.646		1.973.751.336		2.057.473.810		2.145.382.408		
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	60,28	27,00	1.818.076.894	52,78	1.894.015.646	79,78	1.973.751.336	100	2.057.473.810	100	2.145.382.408	8.01.0.00.0.00.01. 0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1.818.076.894		1.894.015.646		1.973.751.336		2.057.473.810		2.145.382.408		
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	60	1.818.076.894	60	1.894.015.646	60	1.973.751.336	60	2.057.473.810	60	2.145.382.408		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.000	4.000		4.000		4.000		3.122		3.122			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1						1		1					
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				118.076.894		194.015.646		129.465.570		157.473.810		195.382.408				
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	118.076.894		194.015.646		129.465.570	1	157.473.810	1	195.382.408				
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		400.000.000		500.000.000				
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.000	4.000	500.000.000	4.000	500.000.000	4.000	500.000.000	3.122	500.000.000	3.122	500.000.000		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200.000.000		200.000.000		344.285.766		500.000.000		450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	344.285.766	1	500.000.000	1	450.000.000		
8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				5.809.495.474		6.052.150.688		6.306.938.662		6.574.466.035		6.855.369.776		
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0	0	5.809.495.474	0	6.052.150.688	0	6.306.938.662	0	6.574.466.035	0	6.855.369.776	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Persentase penanganan konflik sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				5.809.495.474		6.052.150.688		6.306.938.662		6.574.466.035		6.855.369.776		
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2	5.809.495.474	2	6.052.150.688	2	6.306.938.662	2	6.574.466.035	2	6.855.369.776		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	500	250		250		250		250		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	500	250	950.000.000	250	500.000.000	250	750.000.000	250	750.000.000	250	750.000.000		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50	30	500.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	2	500.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3.059.495.474		3.461.278.453		3.356.938.662		3.400.000.000		3.305.369.776		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	2	3.059.495.474	2	3.461.278.453	2	3.356.938.662	2	3.400.000.000	2	3.305.369.776		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					18.534.452.715		19.308.613.156		20.121.481.619		20.974.993.507		21.871.180.987			
8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					2.352.275.397		2.450.526.939		2.553.691.058		2.662.013.384		2.775.751.825			
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	-	63,4	66,72	2.352.275.397	70,04	2.450.526.939	73,36	2.553.691.058	76,68	2.662.013.384	80	2.775.751.825	8.01.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79	80	80		82		82		84		84				
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000		150.000.000		150.000.000		250.000.000		250.000.000			
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	6	75.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	250.000.000	7	250.000.000			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	7	5		5		5		5		5				
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	7	6	50.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	150.000.000	7	150.000.000			
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					25.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	5	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000			
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.150.083.968		1.275.526.939		1.278.691.058		1.287.013.384		1.400.751.825			
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	2	1.150.083.968	2	1.275.526.939	2	1.278.691.058	2	1.287.013.384	2	1.400.751.825			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	66	66		66		66		66		66				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	4		4		4		4		4				
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.051.083.968		1.075.526.939		1.078.691.058		1.087.013.384		1.200.751.825		KAB. KUTAI TIMUR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	66	66	1.051.083.968	66	1.075.526.939	66	1.078.691.058	66	1.087.013.384	66	1.200.751.825			
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					71.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	4	71.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000			
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					28.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2	28.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000			
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000			
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000			
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000			
Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			66	175.000.000	66	100.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	66		30		70		70		70				
8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					75.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	66	75.000.000	66	50.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000			
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			66	100.000.000	30	50.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					370.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000				
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	35	370.000.000	40	350.000.000	43	350.000.000	45	350.000.000	38	350.000.000				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	4		4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	2		2		3		4		3					
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	150.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	3	100.000.000				
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		KAB. KUTAI TIMUR		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	35	120.000.000	40	150.000.000	43	150.000.000	45	150.000.000	38	150.000.000				
8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000				
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.970.229		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			2	135.970.229	15	100.000.000	10	100.000.000	5	100.000.000	20	100.000.000				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1		1		1		1		1					
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					83.064.853		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			1	83.064.853	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					52.905.376		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			2	52.905.376	15	50.000.000	10	50.000.000	5	50.000.000	20	50.000.000			
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.960.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000			
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	276.960.000	12	290.000.000	12	290.000.000	12	290.000.000	12	290.000.000			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					156.960.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	156.960.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000			
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					120.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	120.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000			
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					159.261.200		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000			
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	29	159.261.200	29	175.000.000	29	175.000.000	20	175.000.000	20	175.000.000			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	38		37		1		1		1		1		
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	29	100.000.000	29	100.000.000	29	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000			
8.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					59.261.200		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	38	59.261.200	37	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					5.483.711.777		5.712.759.421		5.953.259.447		6.205.784.475		6.470.935.754			
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	100	20,53	40,40	5.483.711.777	60,26	5.712.759.421	80,13	5.953.259.447	100	6.205.784.475	100	6.470.935.754	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					5.483.711.777		5.712.759.421		5.953.259.447		6.205.784.475		6.470.935.754			
Tersedianya Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	18	0	3	5.483.711.777	5	5.712.759.421	5	5.953.259.447	5	6.205.784.475	5	6.470.935.754			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.125	12	2		2		2		3		3				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.100	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paskibraka (Orang)	200	300	750		750		750		750		750				
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	30		30		30		30		30				
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	500		550		600		650		650				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	200	0	350		400		450		500		500				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	40	40	40		40		40		40		40				
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	0	2		1		1		1		1				
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1				
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					10.000.000		12.759.421		100.000.000		55.784.475		120.935.754		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	2	10.000.000	2	12.759.421	2	100.000.000	3	55.784.475	3	120.935.754			
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					100.000.000		100.000.000		150.000.000		100.000.000		150.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000			
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					250.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.100	0	500	250.000.000	550	200.000.000	600	250.000.000	650	250.000.000	650	250.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					250.000.000		300.000.000		303.259.447		250.000.000		250.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	1.125	12	30	250.000.000	30	300.000.000	30	303.259.447	30	250.000.000	30	250.000.000			
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					200.000.000		250.000.000		250.000.000		200.000.000		250.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	18	0	3	200.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000			
8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					150.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000		150.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	200	0	750	150.000.000	750	250.000.000	750	200.000.000	750	200.000.000	750	150.000.000			
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	1	0	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka					3.873.711.777		4.000.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	200	300	350	3.873.711.777	400	4.000.000.000	450	4.000.000.000	500	4.500.000.000	500	4.500.000.000			
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000			
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000			
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					150.000.000		100.000.000		200.000.000		150.000.000		200.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	40	40	40	150.000.000	40	100.000.000	40	200.000.000	40	150.000.000	40	200.000.000			
8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					2.272.767.995		2.367.698.614		2.467.375.764		2.572.036.772		2.681.930.830	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	72	11,20	28	2.272.767.995	33,50	2.367.698.614	39	2.467.375.764	100	2.572.036.772	100	2.681.930.830			
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					2.272.767.995		2.367.698.614		2.467.375.764		2.572.036.772		2.681.930.830			
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	2.272.767.995	1	2.367.698.614	1	2.467.375.764	2	2.572.036.772	2	2.681.930.830			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.200	100	11		11		11		11		11				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.800	100	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	1	100		100		100		100		100				
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	11	11	100		100		100		100		100				
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					50.000.000		50.000.000		100.000.000		200.000.000		281.930.830		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	281.930.830			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					1.472.767.995		1.617.698.614		1.500.000.000		1.300.000.000		1.000.000.000		KAB. KUTAI TIMUR		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dokumen)	11	11	11	1.472.767.995	11	1.617.698.614	11	1.500.000.000	11	1.300.000.000	11	1.000.000.000				
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					100.000.000		300.000.000		250.000.000		400.000.000		500.000.000		KAB. KUTAI TIMUR		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	5.200	100	100	100.000.000	100	300.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000				
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					300.000.000		200.000.000		267.375.764		372.036.772		300.000.000		KAB. KUTAI TIMUR		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.800	100	100	300.000.000	100	200.000.000	100	267.375.764	100	372.036.772	100	300.000.000			
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					350.000.000		200.000.000		350.000.000		300.000.000		600.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	1	1	350.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	2	300.000.000	2	600.000.000			
8.01.04 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					798.125.178		831.461.848		866.465.352		903.219.031		941.810.394			
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	128	28	30	798.125.178	50	831.461.848	70	866.465.352	100	903.219.031	100	941.810.394	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					798.125.178		831.461.848		866.465.352		903.219.031		941.810.394			
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	1	798.125.178	1	831.461.848	1	866.465.352	1	903.219.031	1	941.810.394			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	300				400				400			500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	50		50		50		50		50				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	350	300	1		1		1		1						
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	1		1		1		1						
8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					84.735.155		100.000.000		116.465.352		100.000.000		91.810.394		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	84.735.155	1	100.000.000	1	116.465.352	1	100.000.000	1	91.810.394			
8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100.000.000		150.000.000		200.000.000		103.219.031		150.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	103.219.031	1	150.000.000			
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					413.390.023		331.461.848		300.000.000		400.000.000		400.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	350	300	300	413.390.023	400	331.461.848	400	300.000.000	500	400.000.000	500	400.000.000		KAB. KUTAI TIMUR		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000				
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	50	100.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000			KAB. KUTAI TIMUR	
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000				
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000				
8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					1.818.076.894		1.894.015.646		1.973.751.336		2.057.473.810		2.145.382.408				
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	60,28	2,45	27,00	1.818.076.894	52,78	1.894.015.646	79,78	1.973.751.336	100	2.057.473.810	100	2.145.382.408	8.01.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.818.076.894		1.894.015.646		1.973.751.336		2.057.473.810		2.145.382.408				
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.000	900	60	1.818.076.894	60	1.894.015.646	60	1.973.751.336	60	2.057.473.810	60	2.145.382.408				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	4.000		4.000		4.000		3.122		3.122				
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50	1						1		1				
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					118.076.894		194.015.646		129.465.570		157.473.810		195.382.408		KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	118.076.894		194.015.646		129.465.570	1	157.473.810	1	195.382.408			
8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					500.000.000		500.000.000		500.000.000		400.000.000		500.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000			
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.000	900	4.000	500.000.000	4.000	500.000.000	4.000	500.000.000	3.122	500.000.000	3.122	500.000.000			
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000	60	500.000.000			
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					200.000.000		200.000.000		344.285.766		500.000.000		450.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	344.285.766	1	500.000.000	1	450.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					5.809.495.474		6.052.150.688		6.306.938.662		6.574.466.035		6.855.369.776			
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0	0	0	5.809.495.474	0	6.052.150.688	0	6.306.938.662	0	6.574.466.035	0	6.855.369.776	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Persentase penanganan konflik sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100				
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					5.809.495.474		6.052.150.688		6.306.938.662		6.574.466.035		6.855.369.776			
Tersedianya Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	2	5.809.495.474	2	6.052.150.688	2	6.306.938.662	2	6.574.466.035	2	6.855.369.776			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	2	250		250		250		250		250				
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	500	250	30		30		30		30		30				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50	30	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	2	1		1		1		1		1			KAB. KUTAI TIMUR		
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					200.000.000		290.872.235		350.000.000		350.000.000		700.000.000				
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2	2	200.000.000	2	290.872.235	2	350.000.000	2	350.000.000	2	700.000.000				
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					600.000.000		300.000.000		350.000.000		574.466.035		600.000.000			KAB. KUTAI TIMUR	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	600.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	574.466.035	1	600.000.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					950.000.000		500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	500	250	250	950.000.000	250	500.000.000	250	750.000.000	250	750.000.000	250	750.000.000			
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	50	30	30	500.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000			
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					500.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		KAB. KUTAI TIMUR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	2	2	500.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000			
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					3.059.495.474		3.461.278.453		3.356.938.662		3.400.000.000		3.305.369.776		KAB. KUTAI TIMUR	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	2	2	3.059.495.474	2	3.461.278.453	2	3.356.938.662	2	3.400.000.000	2	3.305.369.776			

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	-	0	0	0	0	0	0	
2	Jumlah kejadian tindak kriminal	Kasus	-	526	500	473	447	421	394,5	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	%	72	11,20	28,00	33,50	39,00	100	100	
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	128	28	30	50	70	100	100	
3	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	%	100	20,53	40,40	60,26	80,13	100	100	
4	Jumlah Konflik Sosial	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
5	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba	%	60,28	2,45	27,00	52,78	79,78	100	100	
6	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	%	100	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2.	Indeks Pelayan Publik	Indeks	-	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
3.	Indeks Kerawanan Sosial	Indeks	43,77	41,77	39,87	38,05	36,31	34,64	32,31	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

N O	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2.	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba	komulatif	%	60,28	2,45	27,00	52,78	79,78	100	100	
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	komulatif	%	128	28	30	50	70	100	100	
4.	Jumlah Konflik Sosial	negatif	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara	komulatif	%	100	20,53	40,40	60,26	80,13	100	100	
7.	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur	komulatif	%	72	11,20	28,00	33,50	39,00	100	100	

PENUTUP

Rencana Startegis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/stakeholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan umum untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pembangunan dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah:

1. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan

dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan umum agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar Good Governance antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

Sangatta, 2025

Kepala Badan,



Tejo Yuwono, S.Pd
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197309162000121002

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Linmas, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Nomor : 081349631213

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

KUTAI TIMUR

NOMOR : B-000.7.2-2 / 6513 /KESBANGPOL.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur, maka perlu disusun Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Kesatuan...

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan ...

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir serta menyiapkan data target, dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - c. Menyajikan data time series selama 5 (lima) tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani perangkat daerah;
 - d. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani perangkat daerah;
 - e. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang;

Melakukan ...

- f. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur;
- g. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- h. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur;
- i. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- k. Melaporkan hasil penyusunan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur;
- KELIMA : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal, 31-12-2024

Kepala Badan,



Tejo Yuwono, S.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197309162000121002

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2024**

NOMOR : B-000-7.2.2/6573/kebangpol.1

TANGGAL : 31 Desember 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025-2029.**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2029**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- III. Anggota : 1. Perencana Ahli Muda**
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
 - 3. Kasmianti,SE**
 - 4. Akhmad Yani**
- IV. Kelompok Kerja (Pokja)**
 - 1. Kelompok Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama.**
 - a. Ketua : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama**
 - b. Anggota : 1. Ernawati A, SE. MM**
 - 2. Petty Patia Sari, SE, M. Si**
 - 3. Agustiani, S.I.P**
 - 2. Kelompok Kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**
 - a. Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Ke-
masyarakatan**
 - b. Anggota : 1. M. Syarif,SE,M.Si**
 - 2. Teresia Rani Pabetta, SE, M.Si**
 - 3. Ridhawati, S. Sos**

Kelompok ...

3. Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a. Ketua : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- b. Anggota : 1. Samsuriati, SS
2. Fadarudin, S.Sos
3. Erni Erawati, SE



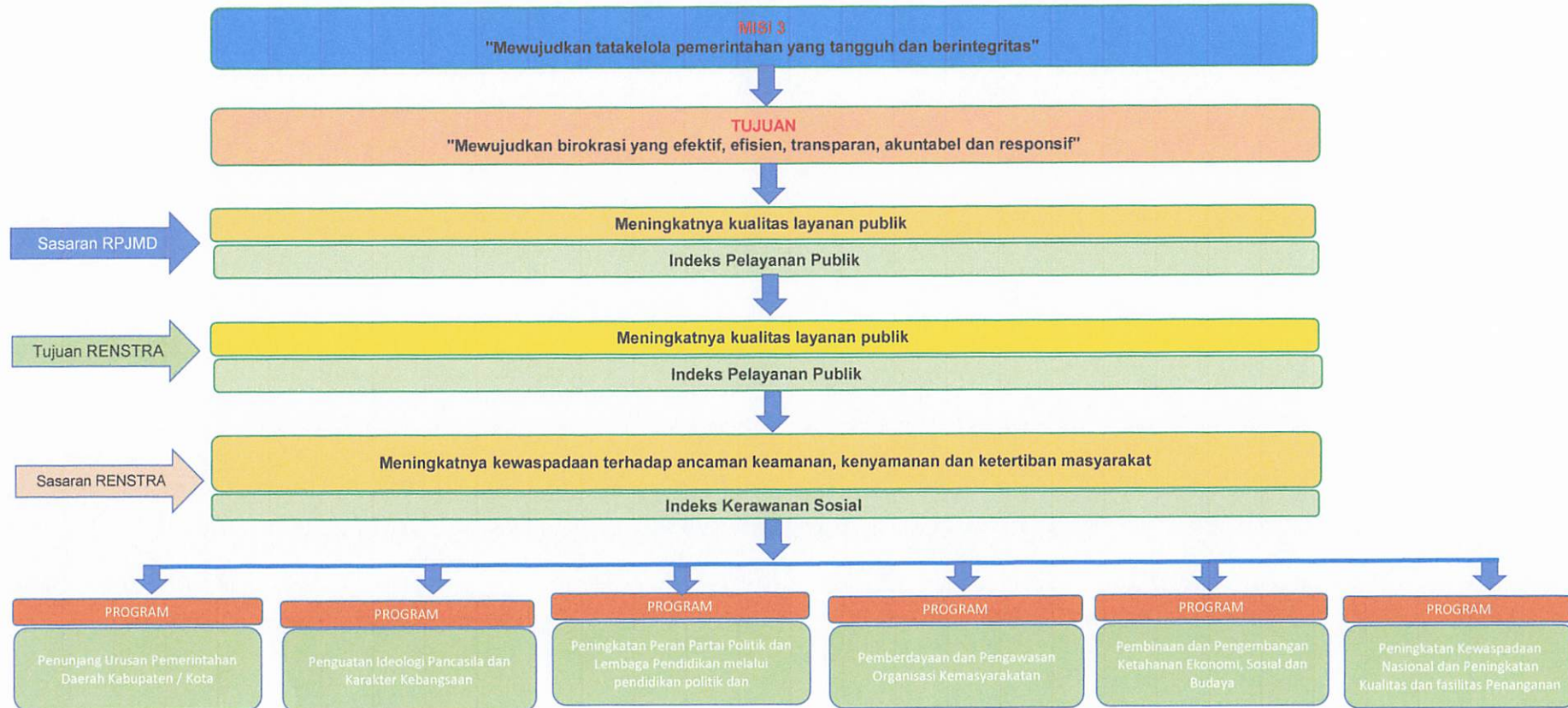
Kepala Badan

Tejo Yuwono, S.Pd

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197309162000121002

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR



POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI TIMUR

